

INTERNALISASI NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K3KS) DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH

Oleh:

Amrazi Zakso

(Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak)

Abstrak: Nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial (K3KS) merupakan nilai kesejarahan yang tidak boleh hilang dari darah nadi setiap warga Negara Indonesia. Namun, seiring dengan perubahan nilai di masyarakat, nilai-nilai tersebut mengalami degradasi bahkan nyaris hilang. Pembelajaran sejarah seyogianya tidak hanya cerita masa lalu, namun harus mampu menginternalisasi nilai-nilai kesejarahan tersebut dalam diri setiap peserta didik. Para guru sejarah sepantasnya melakukan refleksi diri untuk reorientasi baru pembelajaran sejarah yang salah satu di antaranya adalah reorientasi tujuan pembelajaran sejarah.

Kata Kunci: Internalisasi Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan Sosial, Pembelajaran Sejarah.

Pendahuluan

Pada dasarnya, krisis yang terjadi dalam dunia pendidikan dalam skala makro dan mikro (di kelas), termasuk pendidikan sejarah adalah akibat dari hubungan antara tiga kata yaitu *perubahan*, *adaptasi* dan *perbedaan*. Perubahan dunia dari agraris, ke industri dan kemudian ke informasi. Kecepatan perubahan ini tidak diiringi dengan kecepatan adaptasi pendidikan. Konsekuensi perbedaan antara sistem pendidikan dengan lingkungannya adalah inti dari krisis pendidikan tersebut (Comb, 1985). Begitu cepatnya perubahan, bentuk dan arah perubahan menjadi sulit diramalkan. Oleh karena itu,

pendidikan seyogianya mampu memberikan wawasan untuk hidup lebih adaptif di tengah-tengah perubahan.

Bagi bangsa atau generasi yang mampu berpikir, perubahan itu adalah tantangan dalam proses bertumbuh menjadi lebih mampu. Terkait dengan hal tersebut, maka dibutuhkan peran besar pendidikan, agar *out put* pendidikan mampu menghadapi abad ke-21 ini (Kennedy, 2002). Dengan kata lain di era kompetisi global menuntut tersedianya *human capital* yang dapat membawa suatu bangsa menjadi pemenang dan bukan pecundang.

Banyak permasalahan yang dihadapi mata pelajaran sejarah. Pelajaran membosankan, kurang bergengsi karena tidak memberi bekal keterampilan berpikir kritis seperti layaknya belajar sains atau matematika, lebih banyak hapalan, guru berperan dominan (*teacher talk oriented*) sebagai penrasfer informasi selain buku teks, siswa diposisikan sebagai objek dalam pembelajaran, akibatnya kurang memiliki pengalaman belajar yang bermakna serta menganggap lulusan IPS lebih rendah dibanding lulusan yang lain adalah contoh permasalahan pada pelajaran ini. Selain itu, rendahnya penghargaan sebagian masyarakat/siswa terhadap pelajaran tersebut yang memandang sejarah hanya sebagai pelengkap pembelajaran saja, kuatnya anggapan bahwa pendidikan ini tidak dapat memberikan jaminan akan kehidupan yang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan sejarah, terutama dalam mengantisipasi perkembangan global makin membuat mata pelajaran ini sulit untuk diterima banyak kalangan. Realitas realitas seperti itu masih ditambah dengan metode pengajaran yang hanya menempatkan proses kognitif tingkat rendah atau kurang menuntut kemampuan berpikir tahap tinggi (berpikir kesejarahan) sehingga selama ini siswa menajdi cenderung menghafal sejarah dan bukan belajar sejarah. (Al-Muchtar, 1991; Gonggong, 2003; Hasan, 2002; Pramono, 1999; Sanusi, 1989; Stopsky & Lee, 1994).

Dari hasil penelitian Purwanto (1998) ditemukan bahwa kecendrungan pemberian materi pendidikan sejarah kepada mahasiswa di perguruan tinggi yang kurang kritis. Kumaidi (2000) juga menemukan bahwa tingkat penguasaan materi SMA yang rendah oleh mahasiswa semester VII di LPTK cukup memprihatinkan. Yusuf (2004) menemukan bahwa proses pembelajaran di program studi pendidikan sejarah di salah satu perguruan tinggi di Kota Palembang, sebagian besar masih mengikuti “pola lama”, yaitu cenderung menggunakan metode ceramah dan atau diskusi serta berpusat pada dosen. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan betapa penyelenggaraan pendidikan sejarah di tanah air ini masih memprihatinkan.

Dari pengamatan penulis terhadap praktik pembelajaran sejarah di banyak LPTK tampak bahwa :

1. Masih rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran sejarah, dosen mendominasi proses perkuliahan melalui kegiatan ceramah,
2. Kegiatan yang dominan pada mahasiswa adalah duduk, mendengarkan dan mencatat, dibandingkan dengan kegiatan bertanya, memberikan interpretasi, membandingkan, menganalisis bukti sejarah,
3. Masih terdapat dosen yang hanya menggunakan satu buku dan mendiktekan kepada mahasiswa, sehingga tidak terjadi proses berpikir tahap tinggi,

4. sangat sedikit sekali frekwensi penggunaan media/sumber sejarah baik primer maupun sekunder dalam perkuliahan.

Permasalahan pembelajaran sejarah di jenjang persekolahan, tidak dapat dilepas dari permasalahan yang ada pada LPTK, tempat para guru sejarah sebelumnya dididik dan dibina. Menurut Widja (2000:3) perlu dilakukan reorientasi sasaran/tujuan serta semangat pengajaran sejarah baru. Pembelajaran sejarah tidak lagi terlalu menekankan pada pengajaran hapalan fakta-fakta serta afektif doktriner, tetapi lebih sarat dengan latihan berpikir historis kritis analitis, yaitu menerima gambaran sejarah tidak secara pasif reseptif.

Pelajaran Sejarah Selayang Pandang

Seperti yang disampaikan oleh Woolever dan Scoot (1988:115) bahwa, "Sejarah adalah kajian tentang masa lampau manusia, aktivitas manusia di bidang politik, militer, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan hasil kreativitasnya (seni, musik, literatur dan lainnya)". Sementara Amy Von Heyking (2003), "sejarah bukanlah cerita masa lampau, dan bukan catatan peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu, melainkan sebuah bentuk kegiatan *inquiry* yang menolong kita membangun sebuah pemahaman dari kehidupan kita baik secara individu maupun kolektif dalam waktu tertentu". Ungkapan Heyking ini, tidak terlepas dari

pemahaman bahwa sejarah adalah sebuah disiplin ilmu yang merupakan hasil interpretasi yang diperlukan kejelasan kevaliditasan, dan kredibilitas bukti sejarah tersebut dalam kaitannya untuk dianalisis, dibangun dan dibangun kembali narasi tentang masyarakat, peristiwa, dan gagasan di masa lampau (Foster dan Yeager, 1999, Mc Neil, 2000).

Dari perkembangan pengertian sejarah di atas, jelaslah bahwa unsur-unsur yang melekat pada sejarah adalah manusia, peristiwa, masa lalu, catatan/rekaman peristiwa, tempat/ruang kejadian dan kronologis, kegiatan *inquiry*/interpretasi dari suatu peristiwa masa lampau secara ilmiah. Sidi Gazalba (1981:2), Gross (1978:92), dan Lucey (1984:9), menekankan pada tiga aspek utama yang menggambarkan secara keseluruhan dari pengertian sejarah, yaitu peristiwa, manusia dan waktu. Peristiwa yang terjadi hanya satu kali, bersifat unik. Peran manusia dalam melakoni peristiwa tersebut dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dapat dikatakan bahwa bukan sejarah, jika tanpa tiga aspek tersebut.

Pemahaman dan kajian tentang sejarah terus berkembang. Sejarah yang semula hanya terbatas pada cerita masa lalu, kemudian masuk pada kelompok ilmu pengetahuan, berkat jasa bapak sejarah, Heradotus, Oleh sebab itu sebagai sebuah kajian peristiwa manusia masa lalu, sejarah sangat memerlukan ketrampilan berpikir kritis (Mc. Neil, 2000).

Dengan kata lain, pengetahuan sejarah itu tidak lebih dan tidak kurang adalah koleksi ingatan yang dibangun secara hati-hati dan kritis.

Dimensi waktu dalam sejarah, terus disadari bukan hanya untuk upaya perekonstruksian, tetapi lebih dari itu. Sejarah bukan hanya nostalgia atas kejadian lampau, tetapi sebagai sebuah dialog yang terus menerus ke masa sekarang dan akan datang. Sejarah adalah suatu dialog tanpa akhir antara masa sekarang dan masa lampau. Masa sekarang diketahui melalui penjelasan tentang masa lampau. Namun dialog tersebut hanya dapat dicapai melalui penelusuran jejak-jejak sejarahnya (Coolingwood, 2001).

Terkait dengan penulisan sejarah yang akurat, objektif serta tidak pernah final, karena dibatasi oleh catatan sejarah. Keterbatasan catatan sumber sejarah, menurut Commager (dalam Woolever dan Scoot, 1988:118), adalah disebabkan penulisan atau catatan sejarah cenderung dibuat oleh kelompok yang menang perang, dan bukan oleh kelompok yang kalah, atau tersisih. Selain itu adanya sekelompok orang memiliki catatan sejarah yang lengkap dibanding yang lainnya, misal antara bangsa Eropa dengan bangsa Afrika atau Amerika latin. Faktor lain yang menyebabkan biasanya sejarah, yaitu; (1). membesarkan, membuat spektakuler suatu kejadian atau individu, (2). penulisan sejarah yang dipengaruhi oleh rasa kesukuan dan nasionalisme

sejarawan, (3). memberikan penilaian terhadap peristiwa masa lalu dengan standar dan nilai yang berlaku sekarang, (4). membiarkan pengetahuan tentang peristiwa yang belakangan terjadi mempengaruhi kita dalam menganalisis, misal sebab akibat (Woolever dan Scoot, 1988).

Mengenai permasalahan ketidaklengkapan data catatan sejarah, maka Woolever dan Scoot (1988) membagi sejarawan ke dalam dua golongan, berdasarkan tulisan sejarah yang dihasilkannya, yaitu “*descriptive (narrative historians)*” dan “*scientific historians*”. Jika golongan sejarawan yang pertama lebih diarahkan penulisan sejarah pada kegiatan humanis dan kurang memiliki karakteristik objektif dari ilmu sosial, maka sejarawan golongan kedua memiliki komitmen pada sifat, metode, pendekatan ilmu dalam mengupas dan merekonstruksi masa lalu.

Sebagai suatu mata pelajaran di sekolah, sejarah merupakan mata pelajaran yang tertua dibandingkan disiplin ilmu sosial lainnya. Pendidikan sejarah diajarkan di sekolah sejak zaman penjajahan, sesudah kemerdekaan hingga sekarang (Hasan, 2000:9). Pemberian pendidikan sejarah ini lebih diorientasikan kepada kepentingan penguasa/pemerintah yang ada mulai dari Belanda dan Jepang. Gonggong (2003). mengatakan dalam periode tertentu pelajaran sejarah di Indonesia sesudah kemerdekaan juga dijadikan alat penopang kekuasaan. Untuk mengurangi hal tersebut,

Gonggong menyarankan agar dalam pengertian pendidikan sejarah harus diberikan di depan kelas sebagai sejarah dalam pengertian ilmu, tidak dalam pengertian politik.

Pendidikan sejarah tidak hanya dimaknai sebagai alat untuk memberikan pemahaman tentang kemegahan dan kegagalan suatu bangsa di masa lampau, tetapi juga memperkenalkan pebelajar terhadap disiplin ilmu sejarah (berpikir keilmuan) (Hasan, 2003). Dalam konteks makna pendidikan sejarah yang pertama, maka pendidikan sejarah cenderung bersifat transmisi dalam implementasinya, atau lebih fokus pada sisi manusia, generasi penerus. Sedangkan yang kedua menempatkan sejarah seperti tradisi kedua “*social studies, as a social sciences*”, atau dapat dikatakan lebih memfokuskan pada sisi disiplin ilmu.

Keterampilan Berpikir Kesejarahan

Untuk menghilangkan anggapan yang keliru terhadap mata pelajaran ini, dan mewujudkan fungsi dan tujuan pelajaran sejarah maka peranan dosen sangat besar. Berdasarkan hal tersebut, Peter Stearns (2000), mengungkapkan bahwa, pelajaran sejarah tidak hanya mengajarkan kepada siswa tentang peristiwa masa lampau, semestinya mengembangkan ketrampilan melakukan kajian serta mempertajam kemampuan berpikir analitis siswa. Oleh karena itu dia menganjurkan agar LPTK dan para guru sejarah melakukan *review* untuk yakin bahwa ketrampilan

berpikir kesejarahan perlu dikembangkan dalam pembelajaran sejarah. Ketrampilan berpikir kesejarahan terdiri dari: *Chronological thinking, Historical Comprehension, Historical Analysis and Interpretation, Historical research capabilities, Historical issues analysis and decision making* (National Center for History, 1994).

1. Cronological Thinking

Di tahap ketrampilan berpikir kronologis, diharapkan peserta didik dalam belajar sejarah memiliki kemampuan memahami waktu sejarah dan mampu membedakan tiga dimensi waktu (lampau, sekarang dan yang akan datang) dalam rangka mengidentifikasi urutan waktu dari suatu peristiwa. Selain itu kemampuan peserta didik dalam mengukur waktu kalender, menginterpretasi dan menyusun garis waktu, menjelaskan/membandingkan pola urutan dan waktu suatu periode, dan pola kesinambungan dan perubahan.

2. Historical Comprehension

Pada tahap kedua, ini peserta didik diharapkan memiliki kemampuan membaca, memahami hasil narative sejarah secara imajinasi., mengidentifikasi elemen-elemen struktur cerita sejarah dan mengembangkan kemampuan menjelaskan peristiwa masa lalu melalui pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Selain itu juga mampu menggambarkan peristiwa sejarah dalam peta sejarah, dan bentuk-

bentuk tampilan data lain, seperti grafik, tabel dan lainnya.

3. *Historical Analysis and Interpretation*

Di tahap ketiga ini, kemampuan yang diupayakan dimiliki peserta didik dalam kaitannya mengembangkan ketrampilan berpikir kesejarahannya, yaitu membandingkan berbagai pengalaman, kepercayaan, motif, tradisi, harapan yang berbeda dari masyarakat dengan berbagai ragam latar belakang dan berbagai variasi waktu dimasa lalu dan sekarang, kemudian menganalisis bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi tingkah laku masyarakat, memiliki multi perspektif dalam melihat pengalaman manusia dalam data sejarah dan dalam menganalisis kejadian sejarah; dan juga mampu membandingkan dan mengevaluasi penjelasan-penjelasan sejarah.

4. *Historical Research Capabilities*

Pada tahap ini, termasuk kemampuan merumuskan pertanyaan-pertanyaan sejarah dari pertemuan-pertemuan dengan dokumen sejarah, artifak, foto, mengunjungi situs sejarah, dan penjelasan saksi. Serta kemampuan mencari, mendapatkan data, serta mendapatkan informasi dari data yang terkumpul. Selain itu dikembangkan pula kemampuan menemukan kejanggalan atau jarak dari beberapa catatan sejarah, dari waktu dan konteks dalam suatu artifak, dokumen dan sumber lain serta membangun interpretasi kesejarahan.

5. *Historical Issues Aanalysis and Decision Making*

Di dalam tahap kelima dari ketrampilan berpikir kesejarahan, kemampuan yang diupayakan muncul adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi manusia pada masa lampau, dan kemampuan menganalisis minat dan pandangan masyarakat dalam situasi itu, serta mampu mengevaluasi apakah keputusan atau tindakan yang diambil bagus dan mengapa, dan mampu membawa perpektif sejarah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan di masa sekarang.

Internalisasi Nilai K3KS

Kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial (K3KS) menunjuk pada kata sifat. Muara dari keempatnya adalah nilai yang sepatasnya dijunjung tinggi. Memahami K3KS dari sudut pandang pendidikan nilai sungguh merupakan sesuatu yang menarik, karena di situlah sebenarnya letak hakikat pendidikan yang sering dikumandangkan. Sayangnya, muatan nilai yang semestinya mewarnai dunia pendidikan kita, justru tercerabut dari akarnya. Praktik pendidikan kita selama lebih dari 30 tahun sukses menjadikan warga negeri ini manusia yang kaya pengetahuan tapi gersang nilai, termasuk nilai K3KS. Para guru tidak lebih dari seorang transmiter, yang berfungsi memindahkan pengetahuan

yang ada dalam dirinya ke anak didiknya.

Jika K3KS dipandang sebagai nilai (nilai dalam terminologi pendidikan didefinisikan sebagai suatu yang sangat dihargai atau dijunjung tinggi) dikaitkan dengan pembentukan kepribadian (termasuk budi pekerti) maka implementasi K3KS boleh jadi sama dengan pendidikan budi pekerti. Hasil riset Amrazi dan Aswandi (2004) terhadap guru-guru SLTP sampai dengan SLTA di Kota Pontianak menunjukkan bahwa pendidikan budi pekerti itu oleh sebagian besar guru dianggap sebagai tugas dari guru Pendidikan Pancasila, Agama dan Bahasa Indonesia, bukan merupakan tanggung jawab guru yang lain. Dikhawatirkan nasib K3KS juga akan seperti itu. Ini baru sisi tanggung jawab, bukan dari mutu proses pembelajaran di sekolah.

Salahkah para guru tersebut? Mereka memang keliru, namun lembaga yang memproduk guru punya andil besar dalam melakukan kesalahan tersebut. Dimensi pembentukan kepribadian guru di LPTK berakhir pada penguasaan aspek kognitif, sementara aspek lain (sikap dan perilaku) terabaikan. Saat ini hampir semua LPTK yang ada di Indonesia hanya menjadikan guru pandai mengajar, tapi mengabaikan pembentukan kepribadian mahasiswanya. Para dosen di LPTK terjebak dalam pemikiran yang memandang bahwa

porsi mendidik terbesar pada jenjang pendidikan terendah dan semakin mengecil pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi.

Penutup

Nilai K3KS sebenarnya bukan merupakan hal yang sulit untuk diinternalisasikan oleh para guru di sekolah, jika mereka sewaktu didik menjadi guru Sejarah sudah dibekali dengan nilai-nilai K3KS. Dalam ranah profesi guru, K3KS seyogianya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Guru Sejarah namun menjadi tanggung jawab semua guru sebagaimana halnya pendidikan budi pekerti. Sekolah yang baik, adalah sekolah yang tidak hanya mampu mencerdaskan anak didiknya secara intelektual, namun mampu menanamkan nilai-nilai luhur, seperti kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Daftar Pustaka

- Al Muchtar, Suwarma. (1991). *Pengembangan kemampuan Berpikir dan Nilai dalam pendidikan IPS*. Disertasi Doktor pada FPS IKIP Bandung. Tidak diterbitkan.
- Amrazi Zakso & Aswandi. (2005). *Persepsi Guru tentang Pendidikan Budi Pekerti: Studi pada Guru SMA-SMA Negeri Pontianak*. Pontianak : Advocacy Educational Center.
- Collingwood.(2001). *The Principles of History*. United States: Oxford University Press.

- Coombs, Philip, H. (1985). *The World Crisis in Education*. New York: Oxford University Press.
- Gazalba, Sidi. (1981). *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta : Bharatara Karya Aksara.
- Gonggong, Anhar. (2003). "Sejarah Kita Cuma Romantika". *Tempo*, 28-3-03.
- Gross. (1978). *Social Studies for Our Times*. New York : John Wiley & son.
- Hasan, Hamid. S. (1999). "Pendidikan Sejarah Untuk Membangun Manusia Baru Indonesia". *Mimbar Pendidikan*. 22 (18) : 8-11.
- Hasan, Hamid, S. (2002). "Pendidikan IPS di Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah". Makalah pada Seminar Nasional Pembaharuan Pendidikan IPS, Bandung. (31 Oktober 2002).
- Kennedy, Paul.(2002). *Menyiapkan Diri menghadapi Abad ke-21*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Kumaidi. (2000). *Prestasi Belajar Mahasiswa Calon Guru Semester VII*. [Online]. Tersedia:<http://www.depdikn.as.go.id/sikep/issue/SENTRAS/47.html>[20-03-04].
- Lucey, W.L. (1984). *Methods and Interpretation*. New York: Gerland Publishing Co.
- National Center for History In The Schools. (1994). *National Standard for History, Exploring Paths to the Present*. Los Angeles: University of California.
- Pramono, Soewito, Eko. (1999) *Pendidikan Multikultur dalam Pendidikan IPS* Makalah pada Seminar dan pertemuan Ilmiah Pendidikan IPS, Singaraja-Bali.
- Sanusi, Ahmad. 1989. *Kapita Selekta Pembahasan Mahasalah Sosial dan Pendidikan*. Bandung: FPS IKIP Bandung.
- Sternberg. R. (1987). "Teaching Critical Thinking :Eight Easy Ways to Fail Before You Begin". *Phi Delta Kappan* 68 (6) 456-459.
- Stearns, Peter N. Seixas, Peter. Dan Winneburg, Sam. (2000). *Knowing, Teaching & Learning History*. New York : New York University and American Historical Association.
- Stearn, Peter. (2001). *Why Study History? (Online)*. Tersedia : <http://www.Theaha.Org/pubs/stearns.htm> [5-02-04].
- Stopsky, Fred dan Lee, Sharon. (1994). *Social Studies in a Global Society : Amerika Serikat*: Delmar Publishers, Inc.
- Von Heyking, Amy. (2004). "Historical Thinking in The Elementary

Years: A Riview of Current Research”. Dalam *Social Studies Research and Teaching in Elementary Schools*. [Online]. Tersedia: <http://www.Quasar.ualberta.ca/css/Css382>. [10-03-04].

Yusuf, Syafruddin. (2004). *Penerapan Metode Inquiry dalam Pembelajaran Sejarah Sosial di Program Studi Pendidikan Sejarah*. Laporan Penelitian : FKIP UNSRI.